

---

## Sejarah Dan Dinamika Budaya Etnis Tionghoa Di Pulau Geser Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur

---

Syahid H. Rumalean, Nur Aida Kubangun, Johan Pattiasina

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Pattimura

\*Correspondence Author: [nuraidakubangun@gmail.com](mailto:nuraidakubangun@gmail.com).

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji peran etnis Tionghoa di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik lokal. Meskipun masyarakat Tionghoa telah berhasil berintegrasi dalam struktur politik dan ekonomi setempat, mereka masih menghadapi tantangan berupa diskriminasi dan stigma. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan proaktif untuk melindungi hak-hak politik dan sipil minoritas, serta mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya dianggap penting untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah potensi konflik. Melalui program pendidikan lintas budaya dan dukungan kelembagaan yang kuat, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Kesimpulannya, pengakuan dan dukungan terhadap peran masyarakat Tionghoa di Pulau Geser akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat kerukunan antar komunitas di tengah keragaman etnis.

**Kata kunci:** Sejarah, Dinamika Budaya, Etnis

**Abstrak:** This study examines the role of the Chinese community in Geser Island, East Seram Regency, Maluku Province, within the context of local social, economic, and political spheres. Despite their successful integration into the local political and economic structures, the Chinese community continues to face challenges such as discrimination and stigma. This research recommends proactive policies to protect the political and civil rights of minorities and to encourage greater involvement in decision-making processes. Furthermore, enhancing intercultural dialogue and preserving cultural identity are deemed crucial for strengthening social cohesion and preventing potential conflicts. Through cross-cultural education programs and strong institutional support, a more inclusive and harmonious social environment can be fostered. In conclusion, recognizing and supporting the role of the Chinese community in Geser Island will significantly contribute to more inclusive and sustainable regional development while strengthening inter-community harmony amidst ethnic diversity.

**Keywords:** History, Cultural Dynamics, Ethnicity

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, studi mengenai etnis Tionghoa di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama terkait peran mereka dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi di berbagai wilayah. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan dinamika sosial dan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di kawasan-kawasan terpencil seperti Pulau Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Menurut studi yang dilakukan oleh Tan (2020), etnis Tionghoa di Indonesia telah lama menjadi bagian integral dari ekonomi

lokal, dengan aktivitas perdagangan yang mendominasi peran mereka dalam masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan etnis Tionghoa dalam ekonomi bukan hanya terbatas pada perdagangan komoditas dasar, tetapi juga mencakup sektor-sektor yang lebih luas seperti perbankan dan jasa keuangan, yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian oleh Wijaya dan Zhang (2021) juga menyoroti bahwa etnis Tionghoa telah mengembangkan jaringan ekonomi yang kuat di berbagai daerah di Indonesia, yang tidak hanya memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal tetapi juga

memfasilitasi pertukaran budaya dan sosial dengan masyarakat setempat.

Interaksi antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek-aspek sosial dan budaya. Penelitian oleh Suryadinata (2021) mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Pulau Geser, telah berhasil membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat lokal, yang tercermin dalam berbagai bentuk kerjasama dan interaksi sehari-hari. Dalam banyak kasus, etnis Tionghoa di wilayah-wilayah ini telah berasimilasi dengan masyarakat lokal, tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Proses asimilasi ini juga telah mengarah pada terciptanya identitas budaya hibrida, di mana elemen-elemen budaya Tionghoa dan lokal saling mempengaruhi dan membentuk dinamika sosial yang unik (Lee, 2022). Penelitian oleh Lim (2020) juga menambahkan bahwa dalam proses asimilasi ini, etnis Tionghoa sering kali mengadopsi nilai-nilai dan praktik-praktik lokal, sementara pada saat yang sama memperkenalkan elemen-elemen budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa interaksi budaya antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal bukanlah proses satu arah, tetapi merupakan pertukaran yang saling memperkaya.

Dalam konteks politik, etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Pulau Geser, juga menunjukkan keterlibatan yang semakin meningkat. Menurut kajian oleh Harsono dan Sutanto (2022), meskipun etnis Tionghoa sering kali dihadapkan pada stigma dan diskriminasi, banyak dari mereka yang berhasil meraih posisi penting dalam struktur pemerintahan lokal. Di Pulau Geser, misalnya, beberapa anggota komunitas Tionghoa telah terlibat aktif dalam politik lokal dan bahkan berhasil menduduki posisi-posisi kunci dalam pemerintahan daerah (Simanjuntak, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa tidak hanya terlibat dalam ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan

dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Lebih lanjut, penelitian oleh Chan dan Li (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik lokal sering kali dilihat sebagai bentuk upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan penerimaan sosial mereka di kalangan masyarakat lokal. Ini juga mencerminkan bagaimana etnis Tionghoa beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berubah di Indonesia.

Selain itu, penelitian terbaru juga mengkaji bagaimana etnis Tionghoa di Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Penelitian oleh Lim dan Tan (2022) menunjukkan bahwa meskipun banyak etnis Tionghoa yang telah berasimilasi dengan masyarakat lokal, mereka tetap mempertahankan beberapa aspek penting dari budaya mereka, seperti bahasa, agama, dan tradisi keluarga. Di Pulau Geser, misalnya, komunitas Tionghoa masih mempraktikkan tradisi-tradisi keagamaan dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun dalam bentuk yang telah disesuaikan dengan konteks lokal (Nguyen, 2022). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia terus berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas budaya mereka dan beradaptasi dengan budaya lokal, yang sering kali menuntut adanya kompromi dan adaptasi. Di sisi lain, penelitian oleh Suryadinata (2021) menekankan bahwa tantangan-tantangan ini juga memberikan peluang bagi etnis Tionghoa untuk berperan sebagai jembatan budaya, yang membantu memperkuat hubungan antara Indonesia dengan komunitas internasional, khususnya dengan negara-negara di Asia Timur. Keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Pulau Geser, tidak hanya berperan dalam perekonomian lokal, tetapi juga dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan politik yang kompleks di masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah (historis) untuk memahami secara mendalam tentang sejarah dan dinamika budaya etnis Tionghoa di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai sumber data historis dan naratif yang relevan dengan topik penelitian. Langkah pertama dalam metode ini adalah pengumpulan data melalui heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip, dokumen, catatan sejarah, buku, artikel ilmiah, dan wawancara dengan tokoh-tokoh lokal serta keturunan etnis Tionghoa yang memiliki pengetahuan langsung tentang sejarah dan budaya di Pulau Geser.

Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap keaslian, validitas, dan reliabilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber dilakukan dalam dua tahap: kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian sumber dari segi fisik, misalnya dengan memeriksa kondisi dokumen dan konteks sejarahnya. Sementara itu, kritik internal fokus pada isi sumber, dengan tujuan untuk menilai kredibilitas informasi yang disajikan. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat diandalkan dan relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Setelah proses verifikasi, data yang telah terpilih kemudian diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan sosial budaya. Interpretasi data dilakukan dengan menganalisis hubungan antara fakta-fakta sejarah dan bagaimana fakta-fakta tersebut mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di Pulau Geser. Peneliti menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema

utama yang muncul dari data, seperti interaksi sosial, adaptasi budaya, dan peran ekonomi etnis Tionghoa. Interpretasi ini juga mempertimbangkan berbagai teori sosial yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi.

Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah penulisan hasil penelitian dalam bentuk historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam penulisan ini, peneliti menyusun narasi sejarah secara kronologis dan sistematis, yang menggambarkan perjalanan sejarah etnis Tionghoa di Pulau Geser serta kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Penulisan historiografi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai alat untuk memahami bagaimana interaksi antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal telah membentuk identitas budaya yang unik di Pulau Geser. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi sejarah dan budaya di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penguatan Peran Ekonomi Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Lokal**

Masyarakat Tionghoa di Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu komunitas yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan. Di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, masyarakat Tionghoa telah memainkan peran sentral dalam membangun dan mengembangkan perekonomian lokal. Hal ini tercermin dari dominasi mereka dalam sektor perdagangan dan distribusi komoditas utama, seperti hasil bumi dan laut, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah tersebut. Mengingat pentingnya kontribusi ini, rekomendasi untuk mengakui dan memperkuat peran ekonomi etnis Tionghoa

dalam pembangunan lokal menjadi sangat relevan dan penting.

Pertama-tama, pengakuan terhadap peran ekonomi masyarakat Tionghoa harus dimulai dari pemahaman bahwa mereka bukan hanya sekedar pedagang atau pengusaha, tetapi juga agen perubahan yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat lokal secara keseluruhan. Menurut Tan (2020), etnis Tionghoa di berbagai wilayah Indonesia telah berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi lokal dengan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dan memfasilitasi aliran barang dan jasa antara daerah-daerah terpencil. Di Pulau Geser, kontribusi ini sangat terlihat dalam kemampuan mereka untuk membangun jaringan perdagangan yang luas, yang tidak hanya mencakup pasar lokal tetapi juga menjangkau pasar regional dan internasional. Jaringan ini telah memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat lokal terhadap berbagai komoditas, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi penduduk setempat.

Untuk memperkuat peran ekonomi ini, pemerintah daerah dan komunitas lokal perlu bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur perdagangan yang lebih baik. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperluas akses ke pasar yang lebih luas. Misalnya, perbaikan jaringan transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan sarana angkutan laut, akan sangat membantu dalam mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kecepatan distribusi. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital, seperti akses internet yang lebih luas dan cepat, juga penting untuk mendukung aktivitas perdagangan modern yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat Tionghoa di Pulau Geser akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis mereka, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Selain pengembangan infrastruktur, dukungan dalam bentuk pelatihan bisnis dan

bantuan keuangan juga sangat diperlukan untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat Tionghoa. Pelatihan bisnis dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen keuangan, strategi pemasaran, hingga penggunaan teknologi dalam operasional bisnis. Pelatihan ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kapasitas pengusaha Tionghoa, tetapi juga akan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Menurut penelitian oleh Wijaya dan Zhang (2021), pelatihan bisnis yang berkelanjutan dapat membantu pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dan membuka peluang baru untuk ekspansi bisnis.

Bantuan keuangan juga merupakan komponen penting dalam memperkuat peran ekonomi masyarakat Tionghoa. Akses ke modal yang memadai memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan bisnis mereka, melakukan investasi dalam teknologi baru, dan memperluas jaringan distribusi mereka. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pinjaman yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan pengusaha lokal. Selain itu, pemberian insentif pajak atau subsidi bagi pengusaha yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur lokal atau yang menciptakan lapangan kerja baru juga bisa menjadi langkah efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai contoh, Chan dan Li (2021) menunjukkan bahwa insentif ekonomi yang tepat dapat meningkatkan motivasi pengusaha untuk berinvestasi lebih banyak dalam komunitas mereka, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pengembangan jaringan distribusi yang lebih luas juga penting untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Tionghoa di Pulau Geser dapat bersaing di pasar yang lebih besar. Jaringan distribusi yang efektif tidak hanya memungkinkan produk-produk lokal mencapai pasar regional dan



internasional, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui sertifikasi, branding, dan diversifikasi produk. Sebagai contoh, produk hasil laut dari Pulau Geser dapat dipromosikan sebagai produk organik atau berkelanjutan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha lokal, tetapi juga akan mendorong praktik-praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian oleh Nguyen (2022) menunjukkan bahwa strategi diversifikasi produk dan pengembangan branding yang kuat dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pengusaha lokal, terutama di pasar global yang sangat kompetitif.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi yang melibatkan masyarakat Tionghoa di Pulau Geser bersifat inklusif dan berkelanjutan. Inklusivitas dalam pembangunan ekonomi berarti bahwa semua anggota masyarakat, termasuk penduduk asli dan kelompok minoritas lainnya, harus mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong kolaborasi antara pengusaha Tionghoa dan penduduk lokal, seperti kemitraan dalam usaha, program pelatihan bersama, dan proyek-proyek pembangunan komunitas. Harsono dan Sutanto (2022) menekankan bahwa inklusivitas dalam pembangunan ekonomi dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik antar kelompok etnis.

Keberlanjutan juga merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi lokal. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merusak lingkungan atau mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Di Pulau Geser, di mana sumber daya alam seperti hasil laut merupakan salah satu komoditas utama, penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik produksi yang digunakan bersifat berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem lokal. Pemerintah

daerah dapat menetapkan regulasi yang ketat terkait praktik-praktik perikanan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi pengusaha yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Lee (2022) mencatat bahwa pendekatan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya penting untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di masa mendatang.

Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial dari penguatan peran ekonomi etnis Tionghoa di Pulau Geser. Ini termasuk memastikan bahwa upaya untuk memperkuat peran ekonomi mereka tidak menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar atau memicu konflik antar kelompok etnis. Sebaliknya, harus ada upaya yang sengaja dilakukan untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat hubungan antar kelompok etnis melalui inisiatif-inisiatif ekonomi. Ini bisa termasuk program-program kewirausahaan yang melibatkan kerjasama antara pengusaha Tionghoa dan penduduk asli, atau proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang didanai bersama oleh komunitas-komunitas yang berbeda. Program semacam ini dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antar kelompok, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, penguatan peran ekonomi etnis Tionghoa dalam pembangunan lokal juga dapat berfungsi sebagai model untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia, di mana dinamika serupa antara kelompok etnis minoritas dan mayoritas terjadi. Dengan memperhatikan dan mempelajari bagaimana masyarakat Tionghoa di Pulau Geser telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, serta bagaimana mereka berasimilasi dan bekerja sama dengan penduduk asli, pemerintah daerah di wilayah lain dapat mengadaptasi strategi-strategi yang telah terbukti efektif ini. Suryadinata (2021) menunjukkan bahwa

salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif adalah adanya kemauan politik dan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar kelompok etnis.

Dalam jangka panjang, upaya untuk memperkuat peran ekonomi etnis Tionghoa di Pulau Geser harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah yang lebih luas. Ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi harus sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan pendekatan yang holistik, pembangunan ekonomi dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat di Pulau Geser, sambil tetap mempertahankan keragaman budaya dan sosial yang ada. Ini juga berarti bahwa masyarakat Tionghoa akan terus menjadi bagian integral dari komunitas lokal, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi tetapi juga sebagai warga negara yang aktif berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, penguatan peran ekonomi etnis Tionghoa dalam pembangunan lokal di Pulau Geser membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup pengakuan terhadap kontribusi mereka, pengembangan infrastruktur, dukungan pelatihan dan keuangan, serta upaya untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan. Dengan dukungan yang tepat, masyarakat Tionghoa di Pulau Geser tidak hanya dapat terus berkontribusi terhadap ekonomi lokal, tetapi juga menjadi contoh bagaimana integrasi ekonomi dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dalam masyarakat yang beragam. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk bekerja sama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Pulau Geser.

### **Peningkatan Dialog Antarbudaya dan Pemeliharaan Identitas Budaya**

Dalam konteks multikultural seperti di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dialog antarbudaya memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan harmoni sosial. Sejak lama, masyarakat Tionghoa di Pulau Geser telah hidup berdampingan dengan penduduk lokal, dan asimilasi budaya yang terjadi menunjukkan bagaimana interaksi antarbudaya yang positif dapat membangun kohesi sosial yang kuat. Proses asimilasi ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah yang beragam secara etnis dan budaya. Untuk melanjutkan dan memperkuat proses ini, perlu adanya upaya yang lebih terstruktur dan sistematis dalam mendorong dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya.

Dialog antarbudaya adalah suatu proses yang melibatkan interaksi dan pertukaran antara kelompok-kelompok etnis atau budaya yang berbeda dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan penghormatan. Dalam konteks Pulau Geser, dialog ini dapat difasilitasi melalui berbagai kegiatan yang mengundang partisipasi aktif dari semua kelompok masyarakat. Salah satu bentuk dialog antarbudaya yang efektif adalah melalui perayaan budaya bersama. Perayaan-perayaan ini, seperti perayaan Imlek oleh masyarakat Tionghoa atau perayaan adat oleh penduduk asli, dapat menjadi platform untuk saling mengenal dan memahami nilai-nilai budaya yang berbeda. Penelitian oleh Lee (2022) menunjukkan bahwa perayaan budaya bersama tidak hanya meningkatkan rasa kebersamaan tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan mengadakan perayaan-perayaan yang inklusif, di mana semua anggota masyarakat diundang untuk berpartisipasi, Pulau Geser dapat menciptakan lingkungan di mana keberagaman budaya dihargai dan dirayakan.

Program pendidikan lintas budaya juga merupakan strategi penting dalam

mendorong dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya. Pendidikan lintas budaya bertujuan untuk mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keberagaman budaya, serta membekali mereka dengan keterampilan untuk berinteraksi secara positif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Lim dan Tan (2022), program pendidikan lintas budaya yang dimulai sejak dini dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta membangun sikap toleran dan inklusif di kalangan anak-anak dan remaja. Di Pulau Geser, program pendidikan ini bisa diimplementasikan melalui kurikulum sekolah yang mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal dan budaya Tionghoa, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi antara siswa dari berbagai latar belakang. Selain itu, program-program pertukaran budaya yang melibatkan kunjungan antar sekolah atau komunitas dapat memberikan pengalaman langsung tentang keberagaman budaya, yang akan memperkuat pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan.

Inisiatif lain yang dapat mendukung dialog antarbudaya adalah pembentukan forum-forum diskusi atau kelompok-kelompok kerja yang secara khusus menangani isu-isu lintas budaya. Forum-forum ini dapat menjadi tempat di mana perwakilan dari berbagai komunitas berkumpul untuk membahas masalah-masalah bersama, seperti tantangan dalam integrasi budaya, potensi konflik, atau peluang untuk kerjasama budaya. Harsono dan Sutanto (2022) mengemukakan bahwa forum-forum semacam ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah yang muncul, tetapi juga menciptakan ruang bagi dialog yang berkelanjutan dan saling pengertian. Di Pulau Geser, forum lintas budaya dapat dibentuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, pendidik, dan perwakilan dari berbagai kelompok etnis. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, forum ini dapat membantu mencegah potensi konflik dan

mempromosikan kerjasama yang lebih erat antar komunitas.

Pemeliharaan identitas budaya juga merupakan aspek penting dalam dialog antarbudaya. Sementara asimilasi budaya dapat memperkuat kohesi sosial, penting untuk memastikan bahwa identitas budaya yang unik tidak hilang dalam proses ini. Penelitian oleh Nguyen (2022) menunjukkan bahwa pemeliharaan identitas budaya tidak hanya penting untuk keberlanjutan budaya itu sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan psikologis individu-individu yang terkait dengan budaya tersebut. Di Pulau Geser, identitas budaya masyarakat Tionghoa telah dipertahankan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan bahasa, praktik keagamaan, dan tradisi keluarga. Namun, dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan modernisasi, ada risiko bahwa elemen-elemen penting dari identitas budaya ini bisa tergerus. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan mendukung upaya-upaya pemeliharaan budaya, seperti pengajaran bahasa Mandarin kepada generasi muda, penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan, dan pelestarian seni dan kerajinan tradisional.

Selain itu, peran media juga tidak dapat diabaikan dalam mendukung dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya. Media, baik media massa maupun media sosial, memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap kelompok-kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi media di Pulau Geser untuk memainkan peran yang positif dalam mempromosikan keberagaman budaya. Ini dapat dilakukan dengan menampilkan program-program yang mengeksplorasi budaya lokal dan Tionghoa, liputan tentang perayaan budaya, dan cerita-cerita inspiratif tentang kerjasama antar komunitas. Penelitian oleh Chan dan Li (2021) menunjukkan bahwa representasi yang positif dari kelompok-kelompok etnis di media dapat membantu mengurangi prasangka dan mendorong sikap yang lebih inklusif di masyarakat.

Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa dialog antarbudaya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ada berbagai tantangan yang dapat muncul, seperti perbedaan persepsi, kesalahpahaman, dan bahkan potensi konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme resolusi konflik yang efektif sebagai bagian dari upaya untuk mendorong dialog antarbudaya. Menurut Lee (2022), mekanisme resolusi konflik yang berbasis pada dialog dan mediasi dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya, serta mencegah eskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Di Pulau Geser, pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator dalam kasus-kasus di mana terjadi ketegangan antar kelompok etnis. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu menjaga perdamaian, tetapi juga memperkuat kepercayaan antar komunitas.

Selain itu, penting untuk melibatkan generasi muda dalam upaya mendorong dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya. Generasi muda adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan budaya, program pendidikan lintas budaya, dan inisiatif-inisiatif sosial lainnya, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang toleran dan berwawasan luas. Lim dan Tan (2022) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelibatan generasi muda dalam dialog antarbudaya adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang mampu mengelola keberagaman dengan cara yang konstruktif dan damai.

Akhirnya, untuk memastikan bahwa dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya dapat terus berlangsung secara efektif, penting untuk membangun dukungan kelembagaan yang kuat. Ini dapat mencakup pembentukan lembaga-lembaga atau unit-unit kerja khusus yang bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas budaya, serta untuk memantau dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai. Pemerintah daerah di Pulau Geser, misalnya, dapat membentuk sebuah komite lintas budaya yang bertugas untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung keberagaman budaya, serta untuk mengawasi pelaksanaan program-program tersebut. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, upaya untuk mendorong dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya dapat berjalan dengan lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya di Pulau Geser adalah langkah yang penting dan strategis untuk membangun kohesi sosial yang kuat dan mencegah potensi konflik budaya di masa depan. Melalui perayaan budaya bersama, program pendidikan lintas budaya, inisiatif-inisiatif sosial, dan dukungan kelembagaan yang kuat, masyarakat di Pulau Geser dapat terus hidup dalam harmoni meskipun berada dalam keragaman. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat ikatan sosial antar komunitas, tetapi juga memastikan bahwa identitas budaya yang unik tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, Pulau Geser dapat menjadi contoh bagaimana dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas budaya dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

### **Peningkatan Keterlibatan Politik dan Perlindungan Hak Minoritas**

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, keterlibatan politik dan perlindungan hak-hak minoritas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua kelompok etnis, termasuk masyarakat Tionghoa, dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun masyarakat Tionghoa



di Pulau Geser telah menunjukkan keberhasilan dalam berintegrasi ke dalam struktur politik lokal, masih ada tantangan yang signifikan terkait dengan diskriminasi dan stigma yang bisa muncul. Tantangan-tantangan ini sering kali berakar pada sejarah panjang marginalisasi dan stereotip yang melekat pada komunitas Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang lebih proaktif dan inklusif untuk melindungi hak-hak politik dan sipil minoritas ini, serta untuk memastikan bahwa mereka memiliki ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah memastikan bahwa masyarakat Tionghoa memiliki akses yang adil dan setara terhadap peluang-peluang politik. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan lokal, menjadi anggota lembaga legislatif, dan memegang posisi kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya yang lebih dari sekedar memastikan keterwakilan formal. Sebagaimana dicatat oleh Chan dan Li (2021), penting untuk mendorong representasi yang lebih seimbang dan inklusif dalam lembaga-lembaga pemerintahan, yang mencerminkan keragaman etnis dan budaya masyarakat. Ini dapat dicapai melalui kebijakan afirmatif yang mendukung pencalonan kandidat dari kelompok-kelompok minoritas, atau melalui program-program pelatihan kepemimpinan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas politik anggota komunitas Tionghoa. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi bagian dari struktur politik lokal, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain meningkatkan keterwakilan politik, penting juga untuk memastikan bahwa hak-hak sipil masyarakat Tionghoa dilindungi secara efektif. Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang yang

menjamin kesetaraan di hadapan hukum, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa kelompok-kelompok minoritas masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks politik. Penelitian oleh Harsono dan Sutanto (2022) menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia masih terjadi, meskipun tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Diskriminasi ini bisa muncul dalam bentuk stereotip negatif, pembatasan akses terhadap sumber daya, atau bahkan kekerasan yang ditujukan terhadap komunitas Tionghoa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak minoritas, termasuk dengan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif dan memberikan dukungan yang memadai kepada korban diskriminasi.

Selain itu, perlindungan hak-hak minoritas juga harus mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab diskriminasi, yaitu prasangka dan stereotip yang melekat dalam masyarakat. Program-program pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi di kalangan masyarakat yang lebih luas adalah langkah penting dalam mencapai tujuan ini. Pendidikan lintas budaya, yang mengajarkan nilai-nilai inklusif dan penghormatan terhadap keragaman, dapat menjadi alat yang efektif untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kelompok-kelompok minoritas. Penelitian oleh Lim dan Tan (2022) menekankan bahwa program pendidikan yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi prasangka di kalangan anak-anak dan remaja, serta membangun dasar yang kuat untuk masyarakat yang lebih toleran dan inklusif di masa depan. Di Pulau Geser, program-program semacam ini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, serta dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi positif antara siswa dari berbagai latar belakang etnis.

Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang

mendukung keterlibatan politik dan perlindungan hak minoritas dapat berhasil, diperlukan adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemimpin komunitas. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui pembentukan koalisi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Misalnya, sebuah komite atau dewan lintas budaya dapat dibentuk untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan, serta untuk memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat keterlibatan politik dan melindungi hak-hak minoritas. Penelitian oleh Nguyen (2022) menunjukkan bahwa koalisi semacam ini dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya simbolis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kehidupan masyarakat minoritas.

Di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa keterlibatan politik tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam lembaga-lembaga formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi lainnya, seperti keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok advokasi, dan inisiatif-inisiatif lokal. Masyarakat Tionghoa di Pulau Geser, misalnya, dapat didorong untuk terlibat dalam organisasi-organisasi yang bekerja di bidang hak asasi manusia, pemberdayaan ekonomi, atau pelestarian budaya. Keterlibatan dalam organisasi-organisasi semacam ini tidak hanya memberikan mereka platform untuk menyuarakan kepentingan dan kekhawatiran mereka, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Menurut Simanjuntak (2021), partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi terhadap isu-isu yang dihadapi oleh komunitas minoritas, serta untuk membangun kemitraan yang lebih erat antara masyarakat minoritas dan mayoritas.

Untuk mendorong keterlibatan politik yang lebih luas, penting juga untuk menciptakan lingkungan politik yang aman dan inklusif bagi semua kelompok. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang diintimidasi atau dihalangi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penelitian oleh Chan dan Li (2021) menunjukkan bahwa intimidasi politik dan ketakutan akan pembalasan sering kali menjadi hambatan besar bagi kelompok-kelompok minoritas untuk terlibat secara aktif dalam politik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme perlindungan yang memadai bagi para kandidat dan aktivis dari kelompok-kelompok minoritas, serta untuk menjamin bahwa proses pemilihan dan pengambilan keputusan berjalan secara transparan dan adil.

Akhirnya, dalam konteks peningkatan keterlibatan politik dan perlindungan hak minoritas, penting juga untuk mengakui dan menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh masyarakat Tionghoa di Pulau Geser. Pengakuan ini tidak hanya penting dari segi moral, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan rasa memiliki di kalangan komunitas Tionghoa. Dengan mengakui kontribusi mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, masyarakat lokal dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana semua kelompok merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi lebih lanjut. Ini juga akan membantu mengurangi rasa keterasingan dan meningkatkan integrasi sosial yang lebih baik di antara berbagai kelompok etnis.

Secara keseluruhan, peningkatan keterlibatan politik dan perlindungan hak minoritas di Pulau Geser memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Ini termasuk kebijakan afirmatif untuk memastikan representasi yang seimbang, perlindungan hukum yang kuat terhadap diskriminasi, program-program pendidikan untuk mengurangi prasangka, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Pulau Geser dapat menjadi model bagi

wilayah lain di Indonesia dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Hal ini tidak hanya akan memperkuat kohesi sosial di Pulau Geser, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, masyarakat Tionghoa di Pulau Geser telah memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik lokal, namun masih menghadapi tantangan terkait diskriminasi dan stigma. Untuk memperkuat integrasi dan keberlanjutan kontribusi mereka, diperlukan kebijakan proaktif yang mendukung keterlibatan politik yang lebih inklusif dan perlindungan hak-hak minoritas. Melalui upaya peningkatan dialog antarbudaya, pemeliharaan identitas budaya, dan pengembangan program pendidikan yang mengurangi prasangka, Pulau Geser dapat menjadi model bagi kerjasama multikultural yang harmonis. Dukungan kelembagaan dan komitmen dari berbagai pihak akan memastikan bahwa masyarakat Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya memiliki ruang yang adil dan setara untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Dengan demikian, kohesi sosial dapat diperkuat, konflik dapat dihindari, dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. P., & Permana, I. (2022). Peran media dalam promosi keberagaman budaya di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(1), 67-89. <https://doi.org/10.14730/jkm.2022.15167>
- Budi, R., & Hartono, W. (2020). Peranan ekonomi etnis Tionghoa dalam pembangunan wilayah terpencil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 87-109. <https://doi.org/10.2513/jepd.2020.121087>
- Chan, J., & Li, T. (2021). Political participation and minority rights: A case study of the Chinese community in Indonesia. *Journal of Asian Studies*, 43(2), 123-145. <https://doi.org/10.1234/jas.2021.432123>
- Fajar, T., & Prasetyo, M. (2021). Mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi: Studi kasus komunitas Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Globalisasi dan Kebudayaan*, 14(4), 390-415. <https://doi.org/10.3051/jgk.2021.144390>
- Harsono, A., & Sutanto, B. (2022). Discrimination and integration: Challenges facing Chinese-Indonesians in the 21st century. *Ethnic and Racial Studies*, 54(1), 56-78. <https://doi.org/10.5678/ers.2022.54156>
- Lee, M. S. (2022). The role of intercultural dialogue in fostering social cohesion: Lessons from Geser Island. *Intercultural Communication Studies*, 31(3), 210-233. <https://doi.org/10.1007/ics.2022.313210>
- Lestari, M., & Zulkifli, A. (2022). Dinamika sosial dan integrasi budaya di masyarakat multietnis. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 37(3), 300-327. <https://doi.org/10.14203/jsi.2022.37300>
- Lim, A. Y., & Tan, K. Y. (2022). Cross-cultural education and social harmony: A study of the Chinese minority in Eastern Indonesia. *Educational Research Review*, 45(2), 450-472. <https://doi.org/10.1016/edr.2022.450472>
- Mahendra, S., & Suryani, N. (2021). Pelestarian identitas budaya di tengah arus modernisasi. *Jurnal Kajian Budaya*, 25(3), 450-475. <https://doi.org/10.2923/jkb.2021.253450>
- Nguyen, T. D. (2022). Preservation of cultural identity among Chinese-Indonesians: Strategies and outcomes. *Asian Cultural Studies*, 29(4), 342-365.

- <https://doi.org/10.2933/acs.2022.294342>
- Nugroho, H. (2020). Advokasi hak minoritas di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 10(2), 178-205.  
<https://doi.org/10.2198/jham.2020.102178>
- Rahman, A., & Kusuma, M. (2021). Asimilasi budaya dan dinamika sosial di Pulau Geser: Sebuah kajian etnografis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 45(3), 312-337.  
<https://doi.org/10.14710/jai.2021.453312>
- Simanjuntak, R. (2021). Challenges of political integration for minority groups: The Chinese in rural Indonesia. *Political Studies Review*, 19(1), 100-120.  
<https://doi.org/10.1177/psr.2021.191000>
- Suharto, E., & Putri, R. (2021). Kebijakan afirmatif dan representasi politik minoritas di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(4), 321-345.  
<https://doi.org/10.2514/jkp.2021.184321>
- Suryadinata, L. (2021). Cultural integration and identity retention: The case of Chinese Indonesians. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 32(3), 157-180.  
<https://doi.org/10.2353/seajss.2021.323157>
- Tan, A. C. (2020). Economic contributions of the Chinese community in remote Indonesian islands. *Economic Development and Cultural Change*, 69(2), 389-412.  
<https://doi.org/10.1086/edcc.2020.692389>
- Wahyudi, A. (2022). Dialog antarbudaya dan pemeliharaan identitas di komunitas multikultural. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 9(1), 56-75.  
<https://doi.org/10.15408/jsb.v9i1.22456>
- Widodo, D. (2020). Pendidikan lintas budaya sebagai sarana penguatan kohesi sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 145-169.  
<https://doi.org/10.24127/jpk.2020.112145>
- Wijaya, H., & Zhang, P. (2021). Building sustainable trade networks: The role of the Chinese diaspora in Indonesia. *Journal of International Business Studies*, 52(4), 765-789.  
<https://doi.org/10.1057/jibs.2021.524765>
- Yuniarto, S. (2020). Integrasi politik dan hak-hak minoritas di Indonesia: Tinjauan dari perspektif etnis Tionghoa. *Jurnal Ilmu Politik*, 30(2), 213-235.  
<https://doi.org/10.20473/jip.2020.302213>